realitas kebijakan publik

by Kridawati Sadhana

Submission date: 25-Jun-2020 04:50PM (UTC+0700)
Submission ID: 1349461799
File name: BUKU_REALITAS_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf (3.29M)
Word count: 49454
Character count: 331118

Realitas Kebijakan Publik

REALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Kridawati Sadhana, M.S

Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)
d/h Penerbit IKIP Malang, IKAPI No. 059/JTI/89
Jl. Semarang 5, (Jln. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145
Kotak Pos 13, MLG/IKIP Telepon (0341) 553959, 562391, 551312
(4 saluran) psw. 453; Faks. (0341) 566025 E-mail: penerbit@malang.ac.id

Sadhana
Realitas Kebijakan Publik–Oleh: Dr. Kridawati Sadhana, M.S–Cet. I,–
Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2011.

x, 368 hlm; 21 cm

ISBN: 979-495-954-5

- **REALITAS KEBIJAKAN PUBLIK**

  Dr. Kridawati Sadhana, M.S

- Diterbitkan oleh:

PENERBIT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS)
d/h Penerbit IKIP MALANG, Anggota IKAPI No. 059/JTI/89
Jl. Semarang 5, (Jln. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145
Kotak Pos 13, MLG/IKIP Tlp. (0341) 553959, 562391, 551312 (4 saluran) psw. 453
Faks. (0341) 566025 E-mail: penerbit@malang.ac.id

- Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

- Cetakan I: 2011

KATA PENGANTAR

Administrasi publik dan kebijakan publik seringkali digunakan sebagai dua term yang saling menggantikan. Bila ditinjau dengan seksama, kedua term tersebut tidak hanya saling menggantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, keberadaan administrasi bisa dilihat sebagai induk dan kebijakan publik sebagai derivat. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi dari Program Studi Administrasi Publik, bahkan menjadi kajian utama ilmu administrasi negara. Selain itu, kebijakan publik juga bisa dilihat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (administrator publik).

Negara berkewajiban menciptakan *basic social structure* (John Rawls, *A Theory of Justice*) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang *fair* untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan Undang - undang atau kebijakan publik yang dipandang bermanfaat untuk memelihara tertib sosial. Atas dasar itu, fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Tulisan ini diawali dengan pemahaman mengenai administrasi dan kebijakan publik, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas kebijakan publik, baik mengenai proses maupun dampaknya sekaligus sebagai reflek-

si atas tugas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebab Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau *Policy Maker* yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik (masyarakat). Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Karena itu, kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi, dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (rakyat)

Buku ini disusun dalam suatu kerangka pikir yang simpel dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas birokrasi, tugas-tugas pelayanan publik seperti aparatur pemerintah. Selain itu, buku ini dapat dipakai sebagai salah satu referensi dalam diskusi dan pembelajaran mengenai kebijakan publik dengan seluruh proses dan konsekuensinya..

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan dimasa datang.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin!

Malang, 19 Februari 2011
Kridawati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

BAB I **PENDAHULUAN : ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK** 1

1. Konsep Administrasi Publik 2
2. Karakteristik Administrasi Negara/Publik 14
3. Paradigma Administrasi Negara 20
4. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik 37
5. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik 39

BAB II **SEPUTAR KEBIJAKAN PUBLIK** 45

1. Konsep Kebijakan Publik 45
2. Tujuan, Bentuk dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik 65
3. Kebijakan Publik dan Kepentingan Publik 76
4. Analisis Kebijakan Publik 82
5. Birokrasi dan Pelayanan Publik 94

BAB III PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 101
1. Konsep Formulasi Kebijakan Publik 102
2. Proses Formulasi Kebijakan 108
3. Model Perumusan Kebijakan Publik 139

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 169
1. Pengantar 169
2. Konsep Implementasi Kebijakan 173
3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan 198
4. Model Strategi Implementasi Kebijakan Publik 211
5. Catatan Kritis 239

BAB V EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 243
1. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik 243
2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik 255
3. Teknik Evaluasi Kebijakan Publik 274
4. Kategori dan Metode Evaluasi Kebijakan Publik 289
5. Fungsi dan Sifat Evaluasi Kebijakan Publik 302
6. Faktor Ekonomi Politik dari Proses Evaluasi 312
7. Tantangan dan Hambatan Evaluasi Kebijakan Publik 316

BAB VI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK 327

1. Realitas Kebijakan Publik 327
2. Konsep Dampak Kebijakan Publik 330
3. Komponen Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Publik 336
4. Analisis Dampak Sosial 350
5. Catatan Penutup 355

Daftar Pustaka 361

BAB I

PENDAHULUAN :
Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Dewasa ini, administrasi publik dan kebijakan publik seringkali digunakan sebagai dua term yang saling menggantikan. Bila ditinjau dengan seksama maka kedua term tersebut tidak hanya saling menggantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, keberadaan administrasi bisa dilihat sebagai induk dan kebijakan publik sebagai sub bagian. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi dari Program Studi Administrasi Publik. Selain itu, kebijakan publik juga bisa dilihat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (administrator publik). Karena itu, bisa juga dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan kajian utama ilmu administrasi negara.

Dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan *basic social structure* (John Rawls, *A Theory of Justice*) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan

setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan Undang - undang atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial.

Karena itu, tulisan ini diawali dengan pemahaman mengenai administrasi dan kebijakan publik. Sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas kebijakan publik, baik mengenai proses maupun dampaknya sekaligus sebagai refleksi atas tugas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebab Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau *Policy Maker* yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik (masyarakat). Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen.

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan

publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. J.E, Walters dalam "*Basic Administrasion*" (1959) mengatakan bahwa : *we are living in the vast administrative age of science, engineering, industry, government and democracy*".

Ilmu administrasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat akhir-akhir ini, hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran manusia bahwa setiap kegiatan usaha bersama untuk mencapai tujuan baik pemerintahan, bisnis rumah sakit, militer, universitas, maupun kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya, sangat membutuhkan "*administrasi*" untuk merealisasikan tujuan-tujuannya. Bahkan ada adagium yang perlu dipegang teguh yaitu: "Seberapa bagus organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya memproduksi barang dan jasa pada dasarnya ditentukan oleh seberapa bagus ia diadministrasikan". Dengan bahasa lain : "*The quality of administrasion in the face of increasing complexities, growth, dificulties, and problems determinens greatly their success*"

Untuk memahami makna term administrasi publik, ada baiknya terlebih dahulu memahami unsur kata pembentuknya.

Apakah administrasi itu? Banyak sekali pendapat para pakar tentang apa administrasi itu, seperti misalnya:

- J.m. Pfifner (1954)
  "Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends" (administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan)
- H.A. Simon (1958)
  *"Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals "(*administrasi adalah merupakan aktivitas kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama).
- W.H. Newman(1963)
  *"Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some coomon goal" (*Administrasi diartikan sebagai pengarahan, kepemimpinan dan pengendalian usaha sekelompok individu dalam rangka mencapai tujuan bersama)

Secara etimologis, kata *administration* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ad* + *ministrare* dalam bahasa Latin yang mempunyai arti *"to serve"* – memberikan jasa, pelayanan, bantuan,

melayani atau mengabdi. Karakteristik utama administrasi adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (*public service)*. Dapat dikatakan bahwa produk atau hasil dari administrasi publik adalah pelayanan publik/*public service.*

Dari kata Latin *administrare* kemudian dialihkan dalam bahasa Inggris *to administer* diberi arti sama dengan *to manage* , sehingga *administration* mempunyai arti yang sama dengan management yaitu : "mengelola, memimpin, atau mengarahkan semua kegiatan manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama", tetapi ada pula yang membeda-kan arti *administration* dan *management,* seperti misalnya Dalton McFarland (1959) yang mengatakan bahwa: " *administration refers to the determination of major aims and policies, where as management refers to the carying out operations designed to occomplish the aims and effectuate policies";* administrasi berperan menempatkan tujuan-tujuan pokok dan kebijakan-kebijakan, sedangkan manajemen ber-peran melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut secara berhasil.

Selanjutnya di dalam Ensiklopedi Administrasi, pengertian administrasi merupakan terjemahan bahasa Inggris "*administration"* yang diuraikan sebagai berikut:

> "Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam masyarakat senantiasa terdapat kelompok orang yang hidup bersama – sama. Orang – orang itu mengadakan sesuatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh masing-masing orang sendiri...Segenap proses penyelenggaraan kerja sama itu dalam lapangan ilmu sosial disebut administrasi, yang berasal dari bahasa Latin *ad + ministrare.* Suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dari kata kerja tersebut terbentuklah kata benda *administratio* dan kata sifat *administrativus*. Administrasi itu terdiri dari delapan (8) unsur, yaitu 1) pengorganisasian, 2) managemen, 3) komunikasi, 4)kepegawaian, 5) keuangan, 6) perbekalan, 7) tata usaha, dan 8)hubungan masyarakat." (Westra, Sutarto dan Syamsi (ed), 1981).

Kemudian kalau kata administrasi itu ditambah kata negara/ politik / publik lalu menjadi administrasi negara/ publik. Kata publik merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Public*". Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), publik diartikan orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Sementara dalam Kamus Indonesia – Inggris (John M.Echols dan Hassan Saddily, 1996), kata *public* berarti (masyarakat) umum, rakyat. Contoh ; *the general public* (rakyat umum, orang banyak, masyarakat ramai); *public knowledge* (sudah diketahui umum); *public life* (di muka umum); *public utility* (keperluan umum); *public works (*pekerjaan umum); *public administration* (ilmu ketataprajaan, ilmu usaha negara, administrasi pemerintah/ negara); *public servant* (pegawai pemerintahan negara).

Terminologi Administrasi Publik di Indonesia adalah terjemahan dari *public administration* yang sering juga diterjemahkan menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Ada berbagai definisi mengenai administrasi publik, antara lain adalah :

- Dimock, Dimock, dan Koenig dalam "*Public Administration*" mengartikan administrasi publik sebagai "*The activity of the state in the exercise of political power*"
- J.M. Pfifner dan Robert V. Pesthus dalam bukunya "*Public Administration*" mengatakan: "*Public Administration is a process concered with carrying out public policies.*" Kedua definisi tersebut jelas sekali menunjukan aktivitas administrasi negara/

publik yaitu pelaksanaan kekuasaan politik atau kebijakan publik; juga menunjukan peran khusus administrasi negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan politik, sedang siapa yang merumuskannya bukan menjadi peran administrasi negara.

- *Dwight Waldo:*
  Public Administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government (Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen dari orang-orang dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan pemerintah)
- *Sharkansky :*
  Administrasi Negara sebagai arena para Administrator melakukan kegiatan-kegiatan,tugas-tugas dan pekerjaan pemerintah/negara, dan sangat berkaitan erat dengan *Public Policy* atau kebijakan Pemerintah/ Negara.
- Oxford Dictionary of Sociology (2005) menjelaskan "*Public Administration is the Bureaucratic systems and procedures which serve the government and implement its policies. Hence also field of study which describes and analyses policy development and policy implementation processes*. Dengan demikian, administrator publik (birokrasi) harus mampu memahami rea-

litas-realitas sosial untuk bisa merumuskan *public interest* dan *public affairs* (lokus administrasi publik menurut Nicholas Henry) dalam bentuk kebijakan publik, kemudian bertanggung jawab dalam implementasi setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemahaman terhadap realitas sosial (isu kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat) merupakan substansi dari kebijakan publik. Para pengambil kebijakan tidak hanya berpikir sebatas formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, tetapi terutama substansi kebijakan tersebut.

Definisi administrasi publik seperti tersebut di atas, banyak dipengaruhi oleh paradigma administrasi negara yang mengdikotomikan politik dengan administrasi negara, yaitu suatu aliran pemikiran teoritik yang memisahkan peran politik di satu pihak yaitu merumuskan kebijakan publik dan di pihak lain administrasi negara berperan hanya sekedar sebagai pelaksana kebijakan publik tersebut. Paradigma yang memisahkan politik dengan administrasi negara telah lama ditinggalkan, dan sebagai gantinya telah ada paradigma baru yang mengkontinuumkan (menarik hubungan yang erat dan timbal balik) antara politik dan administrasi negara. Pa-

radigma baru inilah yang sekarang banyak mempengaruhi pemikiran teoritik administrasi negara/publik. Kita lihat misalnya definisi administrasi negara yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro berbeda sekali dengan berbagai definisi diatas.

Menurut Nigro dan Nigro dalam "*Modern Public Administration*"(1980): *Public Administration:*

1. *is cooperative group effort in public setting*
2. *covers all three branches-executive, legislative, and judicial-and their interrelationship.*
3. *has an important role in the formulation of public policy and is thus a part of the political process.*
4. *is different in significant ways from private administration*
5. *is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.*

Dari definisi tersebut terutama pada butir 3 jelas sekali menunjukkan peran atau keterlibatan administrasi Negara dalam proses politik yaitu peran untuk merumuskan kebijakan publik. Inilah definisi administrasi negara yang kontemporer yang sesuai dengan paradigma kontinuum politik-administrasi negara. Tentu saja masih banyak lagi definisi yang sama atau mirip yag dikemukakan oleh pakar yang lain.

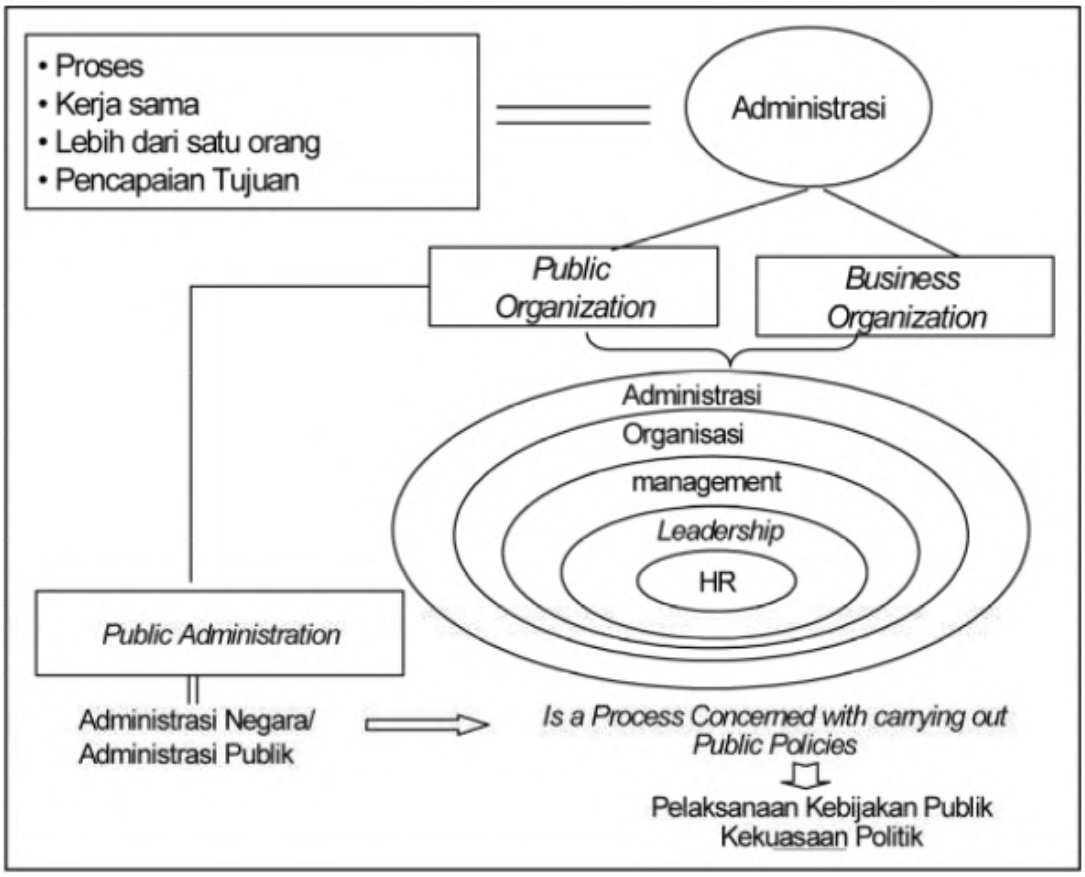

Berbagai uraian konsep administrasi publik baik secara etimologis, secara leksikal maupun pendapat para pakar menunjukkan unsur – unsur penting dalam apa yang disebut administrasi publik yaitu :

1. Peran administrasi publik adalah sebagai pelaksana kebijakan politik atau kebijakan publik , atau sebagai implementor. Dalam

tataran administrasi publik di negara kita, implementor kebijakan publik adalah birokrasi.

2. *Goal* dari administrasi publik adalah pelayanan publik (*public service*). Hal ini selaras dengan makna etimologis administrasi (*ad + ministrare*) yang artinya *to serve* . Tentu saja konsep "pelayanan atau melayani" disini tidak dipahami secara terbatas pada rutinitas aktivitas birokrasi yang seringkali dikonotasikan dengan minimnya inovasi dan kreativitas para administaror publik atau lazim disebut Pegawai Negeri Sipil. Sebab harus diingat bahwa birokrasi adalah profesional karier yang menuntut adanya sejumlah kompetensi sesuai pekerjaan dan jabatannya; sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.
3. Pemerintah atau eksekutif berperan dalam perumusan kebijakan publik (Ingat bahwa di dalam jajaran pemerintah ada jabatan politik (berdasarkan pemilihan atau sering juga disebut *political appointy)* dan ada jabatan karier (birokrasi, berdasarkan pengangkatan sesuai kompetensi dan penjenjangan kari-

er). Pada tataran ini, terkandung adanya tuntutan kepada pemerintah untuk dapat memahami realitas masyarakat sehingga dapat mengartikulasikan kebutuhan dan permasalahan masyarakat dalam bentuk kebijakan publik yang populis.

4. Koordinasi dan kerja sama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah penting dan signifikan dalam proses perumusan kebijakan publik untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai cita – cita bersama (cita – cita negara).
5. Adanya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama. Konsep ini dikenal (sekarang) dengan istilah *good governance* yang mengedepankan kemitraan dan kerja sama antara *state, civil society* dan *private sector.*

Proses Administrasi Publik

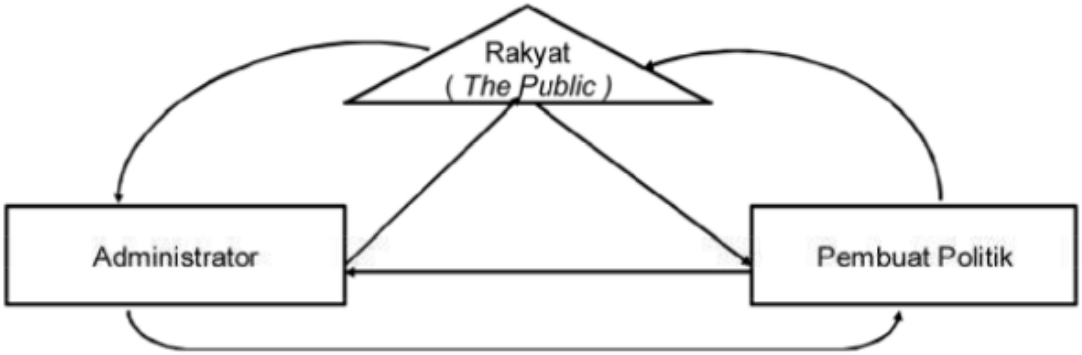

Tabel 1.1 Komponen Dalam Proses Administrasi Publik

PELAKU	PERAN
➢ Rakyat	▪ Sumber Kebutuhan, tuntutan ▪ Harus diusahakan oleh dinas Publik → berupa *Public Service* ▪ Menerima, menggunakan, menikmati dan menilai hasil kerja dinas Publik
➢ Pembuat Politik	▪ Anggota Eksekutif, Legislatif → menerima, menafsirkan kebutuhan dan tuntutan rakyat ▪ Menilai dan menimbang kepentingan yang saling bertentangan ▪ Menentukan *Public Polic*
➢ Pelaksana	▪ Terdiri dari pegawai-pegawai/pekerja yang terorganisir ▪ Menafsirkan kebijakan-kebijakan umum ▪ Merumuskan rencana-rencana, prosedur kerja untuk melaksanakan dan menjalankan Kebijakan Publik

2. Karakteristik Administrasi Negara/Publik

Administrasi negara/publik mempunyai perbedaan dan juga persamaan dengan administrasi niaga/ bisnis/swasta. Persamaan keduanya karena berbasis pada makna "administrasi" sebagai-mana telah dijelaskan di muka yaitu" proses kerjasama sekelom-

pok manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama" itu selalu ada baik pada setting organisasi publik maupun swasta. Yang membedakannya adalah : tujuannya, problemanya, lingkungannya, dasar filosofinya, dsb.

Selain itu pada perkembangan kajian yang lebih kontemporer, administrasi negara punya kaitan yang erat dengan administrasi niaga. Hal ini bisa dilihat misalnya pada pandangan David Osborne dan Ted Gaebler dalam karya monumental mereka "*Reinventing Goverment*" yang mencoba mengaitkan prinsip-prinsip atau doktrin administrasi negara dengan prinsip-prinsip ekonomi/bisnis yang terbentuk ke dalam doktrin "*entrepreneurial Goverment*" walaupun tentu saja sebagai suatu doktrin baru ada pihak-pihak yang pro dan kontra. Aras yang pro yang menghendaki adanya "*joint paradigms*" antara administrasi negara dan administrasi niaga lebih kuat daripada yang kontra. Hal ini terutama disebabkan karena arus globalisasi yang melanda dunia telah menyebabkan semakin "membaurnya" aktivitas-aktivitas yang dilakukan baik oleh administrasi negara maupun administrasi niaga. Ini merupakan tantangan baru dalam paradigma ilmu administrasi.

Karakteristik administrasi negara dan administrasi niaga dalam pandangan klasik yaitu :

1. Administrasi Negara bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masya-rakat (*service making*), sedangkan administrasi niaga bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit making*).
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh administrasi niaga.
3. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat monopoli atau semi monopoli (*no competition*), sedangkan administrasi niaga kegiatannya lebih bersifat persaingan bebas (*free competition*)
4. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara lebih banyak didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku (*legalistic approach*) sedangkan pada administrasi niaga kegiatannya lebih banyak ditentukan secara bebas oleh kebijakan /keputusan pimpinannya yang bermotif mencari keuntungan (*profit motive*).
5. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat administrasi negara kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga-pasar, sedangkan administrasi niaga kegiatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar (*supply and demand principle*)

6. Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (*social welfare*), sedangkan administrasi niaga kegiatannya lebih mengarah kepada pemenuhan kepentingan ekonomi (*economic welfare*) individu atau kelompok orang tertentu
7. Pelaksanaan dan hasil pelayanan yang dilakukan administrasi negara tergantung pada penilaian oleh rakyat banyak dan meminta pertanggungjawaban publik (*public accountbility*), sedangkan administrasi niaga kegiatannya tidak tergantung pada penilaian publik sehingga pelaksanaannya tidak harus bertanggung jawab pada publik.

Selain karakteristik tersebut diatas, adapula beberapa ciri-ciri lain administrasi negara yang membedakannya dengan administrasi niaga yaitu :

Setiap orang dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh/menghindar dari kegiatan administrasi negara.

1. Administrasi negara dapat memaksa setiap orang untuk mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku

2. Kegiatan yang dilakukan oleh administrasi negara seringkali merupakan kegiatan yang harus diprioritaskan
3. Bidang cakupan dan luasnya kegiatan administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas
4. Pimpinan puncak administrasi negara bersifat politis (pejabat-pejabat politik) yang dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
5. Pelaksanaan kegiatan oleh administrasi negara seringkali sangat sulit diukur tingkat keberhasilannya dan effisiensinya
6. Masyarakat senantiasa mengharapkan agar administrasi negara dapat memenuhi segala macam kebutuhan mereka.

Sebagaimana telah disinggung di depan, karakteristik administrasi negara tersebut diatas sebagian sudah tidak relevan lagi karena adanya perkembangan situasi dan kondisi global (ekologi administrasi negara) yang berpengaruh besar terhadap profil dan *performance* administrasi negara. Seperti misalnya timbulnya kesadaran baru yang ingin membentuk profil dan performens administrasi negara yang lebih bernuansa ekonomis (tercapainya tujuan administrasi negara secara lebih ekonomis, efektif dan efisien) dan juga yang lebih demokratis (administrasi negara yang lebih

responsif, representatif, dan mempunyai responsibilitas publik). Semuanya ini menuntut pendekatan administrasi negara yang lebih komprehensif (poliparadigmatik).

Tabel 1.2 Karakteristik Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis

Administrasi Negara / Publik	Indikator	Administrasi Bisnis / Niaga
Makna Administrasi	Persamaan Makna	Makna Administrasi
1. *Service Making* 2. *No Competition* (monopoli) 3.*Legalistic Approach:* • *Social Welfare* • *Public Accountability*	<u>Perbedaan</u> 1. Tujuan 2. Problem 3. Lingkungan 4. Filosofi	1. *Profit Making* 2. *FreeCompetition* 3. *Profit Motive :* • *Suplay and demand Principle* • *Economic Welfare*
Demokrasi (Responsif, Representatif, Responsibilitas publik)		Ekonomis, efektif, efisien

Pendekatan Komprehensif (Poliparadigmatik) → NUANSA ADMINISTRASI NEGARA

3. Paradigma Administrasi Negara

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat dicermati dari perkembangan paradigmanya. Paradigma adalah merupakan suatu "*mainstream*" alur pemikiran/ pandangan yang mendasar dari suatu ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Peran/tugas paradigma adalah : menggolongkan, merumuskan, dan menghubungkan exemplar (hasil temuan ilmu pengetahuan yang telah diterima secara umum) dengan teori-teori, metoda-metoda dan seluruh pengamatan yang terdapat dalam metoda tersebut.

"*Paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science*", demikian kata para pakar. Dan Thomas Khun (1962). Sebagai orang yang tercatat pertama kali mempopulerkan istilah paradigma dalam bukunya yang terkenal "*the structure of scientific revolution*) mengatakan bahwa "perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif tetapi secara revolusi". Ia kemudian menyusun sebuah model perkembangan ilmu-pengetahuan sebagai berikut:

Paradigm I – normal science – anomaly – Crisis – Revolution – Paradigm II.

Model paradigma ilmu pengetahuan Khun ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu paradigma ilmu yang ketika awalnya telah banyak diterima kemudian akan mengalami goncangan – krisis – revolusi – dan seterusnya menghasilkan paradigma ilmu yang baru. Demikian seterusnya, seperti halnya dengan ilmu administrasi Negara.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat perkembangan paradigma ilmu administrasi negara. Banyak sekali pakar administrasi negara yang telah menjelaskan paradigma administrasi negara yang tentu saja pandangan-pandangannya ada yang sama ada pula yang berbeda. Pada kesempatan ini akan dikemukakan pandangan Nicholas Henry mengenai paradigma administrasi negara dalam bukunya *public administration and public affairs* (1975). Menurut Henry dengan mengutip pandangan R.T. Golembiewski , administrasi Negara akan dapat dikaji dengan baik bila administrasi Negara itu dapat diketahui ciri-ciri baik "*locus*" maupun "*focus*"nya. Lokus mempertanyakan tentang dimana letak institusional dari administrasi Negara misalnya apakah di birokrasi pemerintah atau di tempat lain: sedangkan fokus mempertanyakan tentang apa/ spesalisasi administrasi negara itu, misalnya apakah masih tentang prinsip-prinsip administrasi Negara atau telah berubah.

Berdasarkan kedua hal ini Henry mencoba menjelaskan paradigma administrasi negara sebagai berikut:

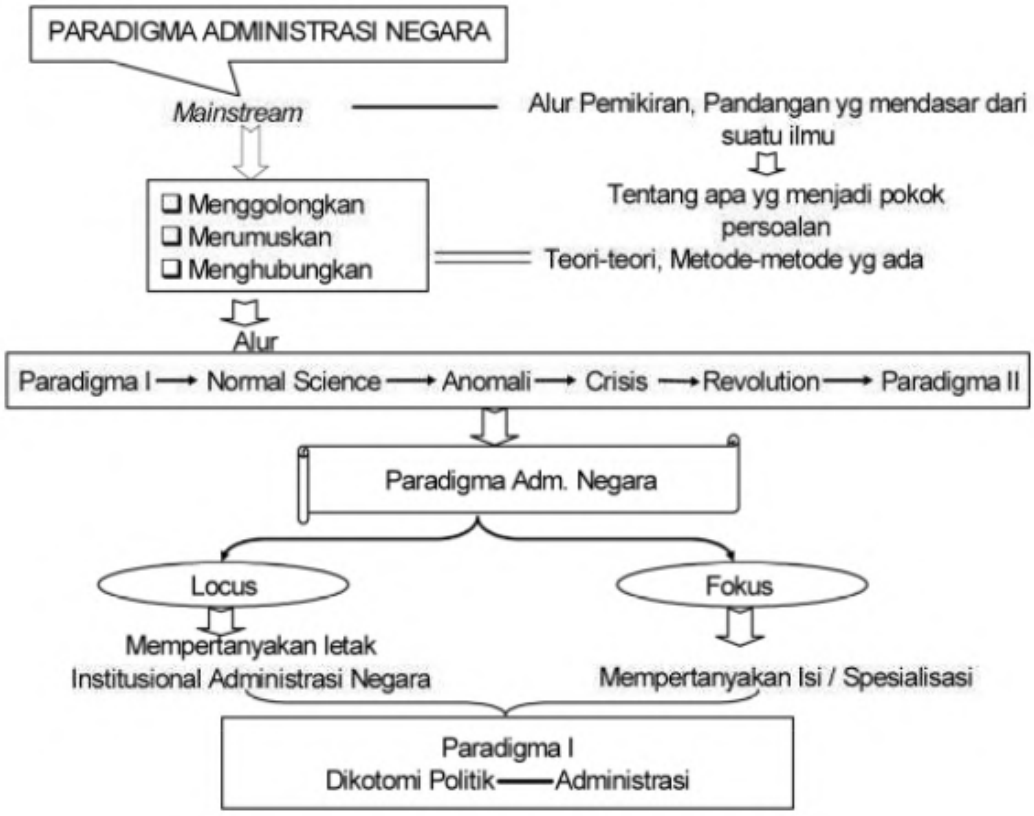

Paradigma pertama (I) :
Dikotomi Politik- Administrasi (1900-1926)

Pada tahun 1900, Frank J. Goodnow (penganut Wilsonian menulis buku berjudul "*politics and administration*", menyatakan bah-

realitas kebijakan publik

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	agusmote.weebly.com Internet Source	1%
2	philosopheryn.blogspot.com Internet Source	1%
3	ondyx.blogspot.com Internet Source	1%
4	e-journals.unmul.ac.id Internet Source	1%
5	Choiri Choiri, Didik Hariyanto. "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	1%
6	jispar.files.wordpress.com Internet Source	<1%
7	ejurnal.binawakya.or.id Internet Source	<1%

8	makalahdanlainnyadhieary.blogspot.com Internet Source	<1 %
9	bocahsastra.wordpress.com Internet Source	<1 %
10	ariplie.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	Arinda Novpika Nerustia, Rita Rahmawati, Denny Hernawan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH KONSERVASI DAN PARIWISATA", JURNAL GOVERNANSI, 2017 Publication	<1 %
12	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.ar.mian.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
14	journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
17	www.unmermadiun.ac.id Internet Source	<1 %
	media.unpad.ac.id	

18	Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
20	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
21	kikiyanti85.blogspot.com Internet Source	<1%
22	herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id Internet Source	<1%
23	www.readbag.com Internet Source	<1%
24	catatananakkuliah.blogspot.com Internet Source	<1%
25	library.uwp.ac.id Internet Source	<1%
26	rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id Internet Source	<1%
27	akangbageur21.wordpress.com Internet Source	<1%
28	jalurhijausepeda.blogspot.com Internet Source	<1%
29	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1%
30	www.pustaka.ut.ac.id	

Internet Source

<1%

31	rukandabanget.blogspot.com Internet Source	<1%
32	rasya01.blogspot.com Internet Source	<1%
33	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%
34	staffnew.uny.ac.id Internet Source	<1%
35	administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1%
36	kasihdearin.blogspot.com Internet Source	<1%
37	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
38	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
39	videos.encyclopedia.com Internet Source	<1%
40	xpresipena.blogspot.ca Internet Source	<1%
41	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1%
42	milasarmila97.blogspot.com	

	Internet Source	<1%
43	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
44	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	<1%
45	jutaan-pengunjung.blogspot.com Internet Source	<1%
46	arinugrohosusanto.wordpress.com Internet Source	<1%
47	anzdoc.com Internet Source	<1%
48	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	<1%
49	suaibatulaslamiyah.blogspot.com Internet Source	<1%
50	www.wadsworthmedia.com Internet Source	<1%
51	Sari Puspitorini. "IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PUMP-P2HP) TAHUN 2014 DI KABUPATEN TRENGGALEK", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019 Publication	<1%

52	nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
54	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
55	marlanhutahaean.wordpress.com Internet Source	<1 %
56	www.keren.web.id Internet Source	<1 %
57	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
58	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
59	kebunhadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	abdiprojo.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
62	donnyprasetya.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
	fia-ub.blogspot.co.id	

64	Internet Source	<1%
65	musliadiuhamka.blogspot.com Internet Source	<1%
66	jrd.bantulkab.go.id Internet Source	<1%
67	ar.mian.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1%
68	dwiocknawati.blogspot.com Internet Source	<1%
69	ap.fip.um.ac.id Internet Source	<1%
70	aptulianiunitri.blogspot.com Internet Source	<1%
71	rizalsalmiah.blogspot.com Internet Source	<1%
72	wennyandita.wordpress.com Internet Source	<1%
73	komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com Internet Source	<1%
74	Yurrike Chintya Dewi, Isna Fitria Agustina. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020 Publication	<1%

75	terrasolusi.net Internet Source	<1 %
76	firjablogger.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	juliyatipanjaitan.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	gedesandiasa.com Internet Source	<1 %
79	djangka.com Internet Source	<1 %
80	yathimaryathie.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	kebijakanpublik12.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	admnegaraupb.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
84	fp.unram.ac.id Internet Source	<1 %
85	www.pengertianpakar.com Internet Source	<1 %
86	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
87	Binsar Antoni Hutabarat. "EVALUASI	

TERHADAP RUMUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2018
Publication
<1%

88 repositorio.ufrn.br
Internet Source
<1%

89 Ade Nawawi, Ade Suparman. "Implemetasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2020
Publication
<1%

90 elib.unikom.ac.id
Internet Source
<1%

91 ejournal.unitomo.ac.id
Internet Source
<1%

92 www.wahyunurharjadmo.staff.fisip.uns.ac.id
Internet Source
<1%

93 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper
<1%

94 bugiargo.blogspot.com
Internet Source
<1%

95 ejournal.unisri.ac.id
Internet Source
<1%

96 paternusrobertsabirin.blogspot.com

Internet Source

<1%

97 jasapengetikan.com
Internet Source

<1%

98 contoh-karya-tulis.blogspot.com
Internet Source

<1%

99 digilib.unpas.ac.id
Internet Source

<1%

100 Stevianus ., Laoh, Martha M. Sendow, Melissa L.G. Tarore. "EVALUASI PROSES BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN MALALAYANG SATU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2016
Publication

<1%

101 Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya. "IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG", JURNAL GOVERNANSI, 2019
Publication

<1%

102 grasbia.blogspot.com
Internet Source

<1%

103 bakripasca.blogspot.com
Internet Source

<1%

104	yulianingsihtanjung.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	adoc.tips Internet Source	<1 %
106	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<1 %
107	Masrully Masrully. "MENAKAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2019 Publication	<1 %
108	littleworld84.blogspot.com Internet Source	<1 %
109	elibrary.ub.ac.id Internet Source	<1 %
110	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
111	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
112	bellaandini.blogs.uny.ac.id Internet Source	<1 %
113	nurulabdulah1508.blogspot.com Internet Source	<1 %

114	Aeda Ernawati. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD RAA SOEWONDO PATI", Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK, 2018 Publication	<1%
115	hanafienst.blogspot.com Internet Source	<1%
116	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
117	Sugito Muzaqi. "TAUHID SEBAGAI PARADIGMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM", MOTORIC, 2018 Publication	<1%
118	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
119	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1%
120	wisberwiryanto.blogspot.com Internet Source	<1%
121	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
122	candradimukamap.ac.id Internet Source	<1%
123	Mulyono Yalia. "Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan	<1%

(MPLIK)", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013
Publication

124	www.sociology.kpi.ua Internet Source	<1 %
125	ollyver-m.blogspot.com Internet Source	<1 %
126	ahalla-ts-fisip12.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
127	Tita Natalia Kaluntas, Olly Esry Harryani Laoh, Yolanda Pinky Ivanna Rori. "EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALASEY DUA KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2019 Publication	<1 %
128	izudinyusuf.blogspot.com Internet Source	<1 %
129	aplikombkelompok2.blogspot.com Internet Source	<1 %
130	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
131	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
132	bappeda.jambiprov.go.id Internet Source	<1 %
133	lesprivatsurabaya.net Internet Source	<1 %

134	fia.unira.ac.id Internet Source	<1%
135	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
136	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
137	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
138	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1%
139	L. J. Sharpe. "Central Coordination and the Policy Network", Political Studies, 2016 Publication	<1%
140	forester-untad.blogspot.com Internet Source	<1%
141	Komir Bastaman. "Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2020 Publication	<1%
142	Upik Hamidah. "PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)", FIAT JUSTISIA, 2014 Publication	<1%

143	Submitted to King's College Student Paper	<1%
144	Isnaini Rodiyah. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1%
145	rajadariusputra.wordpress.com Internet Source	<1%
146	baidowigaoh.blogspot.com Internet Source	<1%
147	karya-kamal.blogspot.com Internet Source	<1%
148	qolbi.wordpress.com Internet Source	<1%
149	konsultantesissurabaya.wordpress.com Internet Source	<1%
150	locusfisipunipas.blogspot.com Internet Source	<1%
151	Rachmi Yulianti. "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Penataan Kelembagaan (Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018 Publication	<1%

152	geoenviron.blogspot.com Internet Source	<1 %
153	taufiqurokhman.com Internet Source	<1 %
154	tasbinet.blogspot.com Internet Source	<1 %
155	b-ok.org Internet Source	<1 %
156	Hanny Purnamasari, Rachmat Ramdani. "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang", ijd-demos, 2020 Publication	<1 %
157	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
158	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %
159	marwiyatiulfa.blogspot.com Internet Source	<1 %
160	priyadi.net Internet Source	<1 %
161	kbbi.web.id Internet Source	<1 %
162	nwyg1.mx.am Internet Source	<1 %

163	"The Institute of Management Sciences—XIV International Meetings", Management Science, 1967 Publication	<1 %
164	Istianah Setyaningsih. "ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SALATIGA", Reformasi Administrasi, 2018 Publication	<1 %
165	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1 %
166	ikhaputri97.blogspot.com Internet Source	<1 %
167	fahminugroho92.blogspot.com Internet Source	<1 %
168	vdokumen.com Internet Source	<1 %
169	yolandavanny.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
170	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
171	e-jurnal.upgrismg.ac.id Internet Source	<1 %
172	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
173	prezi.com	

Internet Source

<1%

174	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
175	soal-soal-latihan.blogspot.com Internet Source	<1%
176	fexdoc.com Internet Source	<1%
177	Juhanis Juhanis. "FILOSOFI WIRAUSAHA PROFETIK; SEBUAH REFLEKSI DALAM MERINTIS WIRAUSAHA DEWASA INI", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2018 Publication	<1%
178	plus.google.com Internet Source	<1%
179	ejournal.unsub.ac.id Internet Source	<1%
180	ojenkansil.blogspot.com Internet Source	<1%
181	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
182	Submitted to Sogang University Student Paper	<1%
183	modelrumahku.com Internet Source	<1%

184	arrosyadi.wordpress.com Internet Source	<1%
185	repository.upi.edu Internet Source	<1%
186	"Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1%
187	Ine Mariane, Titin Kartini. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Moden Terhadap Efektivitas Pembinaan Sektor Informal Di Kabupaten Subang", The World of Business Administration Journal, 2020 Publication	<1%
188	rennydwiutami.blogspot.com Internet Source	<1%
189	M Junaidi, L.Hendra Maniza, Baiq Selasmiati. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Publication	<1%
190	Taufik H. Simatupang. "Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian	<1%

Hukum De Jure, 2019
Publication

191	Binsar Antoni Hutabarat. "Evaluasi terhadap Rumusan RUU Permusikan", Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 2019 Publication	<1%
192	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
193	Stefanus Bekun, Agustinus L. Tiza. "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Transformasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara", AGRIMOR, 2017 Publication	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		